

INTISARI

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara tingkat kepatuhan pemerintah daerah terhadap peraturan perundang-undangan dan opini atas LKPD serta mengidentifikasi faktor penyebab terjadinya kegagalan pendeteksian atas ketidakpatuhan, termasuk di dalamnya ketidakpatuhan yang mengandung unsur fraud, dalam pemeriksaan LKPD. Metoda yang digunakan ialah explanatory sequential mixed methods dengan pendekatan analisis konten atas 54 sampel LKPD dan wawancara terhadap para auditor BPK. Hasil penelitian menunjukkan bahwa memang terdapat hubungan antara tingkat kepatuhan pemerintah daerah dengan opini atas LKPD, namun terdapat risiko kegagalan deteksi dan risiko kesalahan dalam memberikan opini yang disebabkan oleh perbedaan konsep dalam hal penentuan fraud, perbedaan konsep materialitas di antara pemeriksa BPK, kegagalan dalam memutakhirkan program pemeriksaan, potensi ancaman/bahaya yang dialami auditor, dan kegagalan dalam mengurangi persepsi negatif pemeriksa atas perlindungan kerja. Keterbatasan penelitian ini ialah sampel wawancara hanya melibatkan pemeriksa dari tiga kantor perwakilan yang berasal dari pulau Jawa dan tidak melakukan konfirmasi kepada unit yang bertanggungjawab dalam penyusunan panduan/pedoman pemeriksaan dan unit yang menangani masalah hukum. Di antara implikasi penelitian ini ialah BPK harus meningkatkan efektivitas penjaminan mutu pemeriksaan untuk meningkatkan kualitas pemeriksaan dan pemeriksa BPK harus mampu menerapkan prinsip due professional care dalam melaksanakan pemeriksaan LKPD sehingga kualitas audit tetap terjaga. Penelitian ini mempertimbangkan materialitas dalam menganalisis temuan ketidakpatuhan serta berupaya mengidentifikasi faktor penyebab hubungan tersebut.

Kata Kunci: Audit Sektor Publik, BPK, Opini LKPD, Kepatuhan

ABSTRACT

This study aims to analyze the correlation between the level of local government compliance with laws/regulations and opinions on the Local Government Financial Statements (LGFS) and identify the causes of failure in detecting non-compliance, including non-compliance that contains elements of fraud, in LGFS audit. The method used is explanatory sequential mixed methods with a content analysis approach on 54 LGFS samples and interviews with the Audit Board of Indonesia (Badan Pemeriksa Keuangan/BPK) auditors. The results showed that there was indeed a correlation between the level of compliance of the local government and the opinion on the LGFS, but there was a risk of detection failure and the risk of errors in opinion caused by different concepts in determining fraud, differences in the concept of materiality among BPK auditors, failure to update programs audit, potential threats/dangers experienced by the auditors, and failure to reduce the auditors' negative perception of work protection. The limitation of this study was that the interview sample only involved auditors from three representative offices originating from Java and did not conduct confirmation to the unit responsible for the preparation of guidelines/guidelines for the audit and units that deal with legal issues. This research implied that BPK must increase the effectiveness of audit quality assurance to improve audit quality and BPK auditors should be able to apply the principle of due professional care in carrying out the LGFS audit so that audit quality is maintained. This study also considers materiality in analyzing the findings of non-compliance and attempts to identify the factors causing the correlation.

Keywords: Public Sector Audit, The Audit Board of Indonesia, BPK, Supreme Audit, Compliance